

**PENGARUH PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH ACEH (Studi Pada Dinas
Pendapatan dan Kekayaan Aceh)**

Oleh

Rusman, SE, M.Si

Dosen STIES Banda Aceh

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pengelolaan kekayaan milik negara terhadap kualitas laporan keuangan (Studi Pada Dinas Pendapatan dan Kekaayaan Aceh). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif asosiatip, yaitu mengetahui hubungan variable independen Penata Usahan barang Milik Negara dengan variable dependen Kualitas laporan Keuangan. Sampel digunakan 25 orang responden, dengan methoded sensus. Analisa data dilakukan dengan menggunakan regresi linier sederhana dengan alat bantu SPSS 17. Dari hasil analisa selanjutnya dirumuskan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penatausaahaan Barang Milik Negara berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Pemerintah Aceh . Hasil uji- t menunjukkan bahwa Hasil uji $t_{hitung} = 7.326 > \text{tabel } (2,2167)$, tingkat signifikan 0,000 lebih kecil dari 0.05 (5%). Disamping itu, hasil uji R pada *Model Summary* menunjukkan sebesar 0.700 atau 70 %, , yaitu diatas 50 %, jadi pengaruhnya positif dan relatif kuat.

Kata Kunci : Penatausahaan BMN , Kualitas Laporan Keuangan

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Dan Permasalahan

Di Indonesia salah satu agenda reformasi yang telah dilaksanakan adalah pengelolaan keuangan Negara baik di Pemerintah Pusat maupun di Pemerintah Daerah. Untuk itu, diterbitkan U-U No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, U-U No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan U-U No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta U-U No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual sebagai perbaruan P. P. No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, Peraturan Menteri (Permen) diantara Permen Menteri Keuangan No. 233/PMK.05/2011 tentang perubahan atas Permen Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah. Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59, Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Disamping itu, diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah disebutkan bahwa Laporan keuangan pemerintah pusat/daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Informasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) memberikan sumbangan yang signifikan di dalam laporan keuangan pemerintah khususnya neraca yaitu berkaitan dengan pos-pos persediaan, aset tetap, maupun aset lainnya. Hal ini menjadikan pertanggungjawaban atas barang milik Negara menjadi sangat penting. Keakuratan data barang milik Negara tentunya sangat dibutuhkan dalam mendukung laporan keuangan agar dapat tersaji secara wajar dan berkualitas.

Dengan demikian, bahwa Pengelolaan Barang milik Negara memberikan sumbangan (berpengaruh) yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Dan Pengelolaan Barang Milik Negara yang baik, terdiri dari pembukuan, inventarisasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud Permen Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007), tentang

penatausahaan barang milik Negara (BMN) dan Peraturan Menteri keuangan Nomor 29 Tahun 2010, tentang penggolongan dan kodifikasi barang milik Negara.

Di Pemerintah Aceh salah satu organisasi yang mengurus penegelolaan kekayaan dan keuangan Negara adalah Dinas Pedapatan dan Kekayaan Aceh (DPKA). Dinas ini dibentuk berdasarkan Qanun Nomor 14 Tahun 2013, dan berkedudukan di Kota Banda Aceh. Tugas pokok DPKA adalah melaksanakan Penatausahaan Barang Milik Aceh (BMA) guna mendukung penyajian laporan keuangan Pemerintah Aceh, yaitu pembukuan, inventarisasi dan pelaporan sebagaimana pasal 26 Qanun 14 Tahun 2013.

Namun masih terjadi permasalahan atau fenomena yang mengakibatkan bahwa kualitas laporan keuangan Pemerintah Aceh masih rendah atau belum optimal. Hal ini dapat dilihat hasil audit BPK terhadap laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2014, Nomor : 10.B /LHP/XVIII.BAC/05/2014 dengan opini wajar dengan pengecualian (WDP). Hal ini, diprediksi dipengaruhi antara lain penatausahaan barang milik Aceh belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, diantaranya terdapat SKPA yang tidak membuat Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran, dan sebagainya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul tersebut diatas.

1.2. Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas dapat dirumuskan masalah penelitian ini: Apakah Penatausahaan Barang Milik Aceh Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis: pengaruh penatausahaan barang milik Negara terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh .

1.4. Manfaat Penelitian

- a. Pemerintah Aceh. Memberikan kontribusi dan tambahan informasi dan atau masukan-masukan yang berguna guna merumuskan kebijakan yang diperlukan .
- b. Kalangan Akademik. Memberikan kontribusi dan tambahan informasi referensi.
- c. Bagi Peneliti selanjutnya. Djadikan acuan untuk mengkaji ilmu pengetahuan tentang penatausahaan barang milik negara dan kualitas laporan Keuangan pada Pemerintah.

2. LANDASAN TEORI

2.1. Laporan Keuangan

Dalam PP No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dijelaskan bahwa laporan keuangan pemerintah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode laporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan

2.1.1 Komponen Laporan Keuangan

Menurut PP No.71 tahun 2010 Laporan Keuangan Pemerintah terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Arus Kas;
4. Catatan atas Laporan Keuangan.

Selain laporan keuangan diatas, Entitas Pelaporan, diperkenankan menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Entitas.

2.1.2 Unsur Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan keuangan pemerintah yang disusun haruslah memenuhi karakteristik kualitatif. Dalam PP No.71 tahun 2010, karakteristik kualitatif didefinisikan sebagai ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Terdapat empat karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat disajikan sesuai dengan kualitas yang dikehendaki, yaitu :1) Relevan, 2) Andal, 3) Dapat Dibandingkan

- 4) Dapat Dipahami

2.2 Pengertian Barang Milik Negara

Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mendefinisikan Barang Milik Negara (BMN) sebagai “semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah”. Yang dimaksud barang yang berasal dari perolehan lain yang sah meliputi (a) barang yang diperoleh dari

hibah/sumbangan atau sejenis; (b) barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak; (c) barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; dan (d) barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan barang milik Negara mendefinisikan barang milik Negara adalah setiap barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja dan belanja Pemerinah atau berasal dari sumber lain yang syah.

2.2 1 Jenis Barang Milik Negara

Perlakuan Akuntansi dalam PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintah membagi barang milik Negara menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Tak Berwujud, Aset Lainnya, dan Aset Bersejarah.

2.2.2.Pengertian Penatausahaan BMN

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN, Penatausahaan BMN adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMN sesuai ketentuan yang berlaku. Pembukuan BMN adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam Daftar Barang menurut penggolongan dan kodifikasi. Inventarisasi BMN adalah kegiatan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan BMN. Pelaporan adalah kegiatan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh unit pelaksana Penatausahaan BMN pada Pengguna Barang dan Pengelola Barang. Maksud dari pelaporan adalah agar semua data dan informasi mengenai BMN dapat disajikan dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan dengan akurat guna mendukung pelaksanaan pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan BMN dan sebagai bahan penyusunan Neraca Pemerintah Pusat.

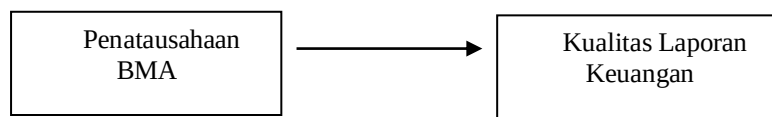
2.2.3.Prosedur Penatausahaan BMN

Menururt Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik Negara, menjelaskan prosedur penatausahaan barang milik Negara sebagai berikut :

- (1) Kuasa pengguna barang/engguna barang harus melakukan pendaftaran dan pencacatan barang pemilik Negara/daerah kedalam Daftar barang Kuasa Pengguna (DBKP)/Daftar barang pengguna (DBP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
- (2) Pengelola barang harus melakukan pendaftaran dan pencacatan barang milik Negara/daerah berupa tanah/dan atau bangunan dalam Daftar Barang Milik Negara Daerah (DBMN/D) menurut penggolongan barang dan kodefikasi barang.
- (3) Penggolongan dan kodefikasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh menteri keuangan .
- (4) Penggolongan kodefikasi barang daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapatkan pertimbangan menteri Keuangan.

2.3. Kerangka Konseptual

Pradigma penelitian atau kerangka konseptual seperti pada gambar berikut ini



2.4. Hipotesis

Rumusan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

Ho : Penatausahaan Barang Milik Aceh (BMA tidak berpengaruh Terhadap Kualitas laporan Keuangan Pemerintah Aceh.

Ha : Penatausahaan Barang Milik Aceh berpengaruh Terhadap kualitas laporan Keuangan Pemerintah Aceh.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penarikan Sampel

Menurut Sugiyono, (2014:148) mengatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai identitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam lainnya.

Populasi juga bukan sekedar jumlah, yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik, sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu.

Populasi dalam penelitian ini adalah 120 pegawai dilingkungan Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh dengan kriteria sebagai berikut :

- 1). Pegawai mempunyai jabatan struktural minimal 1 tahun .
- 2). Pegawai yang mempunyai jabatan fungsional minimal 1 tahun.
- 3). Staf/Pegawai yang berpengalaman kerja atau pangkat minimal golongan III.

Dari kriteria yang telah ditetapkan, maka jumlah populasi yang memenuhi kriteria berjumlah 25 orang dan dijadikan sampel (metode sensus) (Sugiyono, 2014:156. Secara rinci dapat dilihat pada table berikut ini

Populasi sasaran Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh

NO	UNSUR POPULASI	JUMLAH (Org/Responden)
1	Sekretaris	1
2	Ka. Bag. Pengelola Aset	1
3	Kasub.Bag (Kasie)	2
4	Staf gol III	21
	Jumlah Populasi Sasaran	25

Sumber Data Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh, 2014 (diolah)

3.2. Metode Pengumpulan Data

Data primer.

a. Kuesioner .

Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya yang akan responden jawab. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pertanyaan terbuka, misalnya menanyakan nama responden, tempat tinggal responden, usia responden. Skala pengukuran penelitian dilakukan dengan *skala likert* (Sugiyono,2006:28),

2) Studi Kepustakaan.

Studi pustaka adalah data dengan tujuan untuk mengetahui berbagai teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, diantaranya berasal dari buku, majalah, ataupun jurnal yang relevan dengan penelitian ini.

3.3. Definisi dan Operasionalisasi Variabel

Untuk lebih jelasnya definisi masing-masing variable, indicator, dan skala pengukuran dapat dilihat pada table berikut :

Operasional Variabel

Variabel	Defenisi	Indikator	Skala Pengukuran
Kualitas Laporan keuangan (Y)	Kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya: (PP Nomor 71 Tahun 2010)	1) Relevan 2) Andal 3) Dpt dibandingkn 4) Dpt Dipahami	1 – 5 1 – 5 1 – 5 1 – 5
Penatausahaan Barang Milik Negara (X)	Penatausahaan BMN adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMA sesuai ketentuan yang berlaku (Qanun Nomor 14 Tahun 2014)	1. Pembukuan 2. Inventarisasi 3. Pelaporan	1 – 5 1 – 5 1 – 5

3.4. Metode Uji Validitas dan Reliabilitas

a. Uji Validitas

Uji Validitas untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Imam Ghazoli, 2005). Untuk mengukur validitas dapat dilakukan dengan melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variable. Sedangkan untuk mengetahui skor masing-masing item pertanyaan valid/tidak, maka ditetapkan kriteria statistik :

1. Jika $r \text{ hitung} > r \text{ table}$ dan bernilai positif, maka variable tersebut valid
2. Jika $r \text{ hitung} < r \text{ tabel}$, maka variable tersebut tidak valid.
3. Jika $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$ tetapi bertanda negative, maka H_0 akan tetap ditolak dan H_1 diterima.

b. Uji Keandalan (Reliability)

Untuk mengukur keandalan kuesioner, digunakan uji reliabilitas. Umumnya pendekatan yang digunakan adalah dengan cara menghitung *Cronbach Alpha* masing-masing variable yang terlibat, yaitu menafsirkan korelasi antara skala yang dibuat dengan

semua skala variable yang ada. Ukuran reliabilitas dianggap handal berdasarkan *Cronbach Alpha* adalah sebesar 0.60 (Malhotra, 2004)

3.5. Pengujian Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, Ghozali (2001). :

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam uji normalitas adalah metode *Normal Probability Plot*, (Ghozali (2006:166).

3.6. Metode Analisis Data

Analisis data dengan menggunakan alat statistik yaitu regresi linier sederhana. Alat bantu dengan menggunakan program *Statistik Package For social Science* (SPSS) (Gujarati, 2006:130). Bentuk matematisnya regresi linier sederhana sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta X + e.$$

Keterangan : Y = Kualitas Laporan Keuangan, α = Konstanta, β , = Koefisien Regresi, X = Penatausahaan Barang Milik Aceh, e = Error term

3.7. Rancangan Pengujian Hipotesis

1) Pengujian Pengaruh Secara Bersama-Sama (Simultan)

- Jika $t_{hitung} < t_{tabel} (n-k-1)$ maka menerima hipotesis nol (H_0) artinya variabel ; penatausahaan barang Negara secara bersama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Aceh .
- Jika $t_{hitung} > t_{tabel} (n-k-1)$ maka menolak hipotesis nol (H_0) dan menerima hipotesis alternative (H_a), maka variabel penatausahaan barang miik Negara berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Aceh

2) Uji t atau Uji Parsial

- Jika $t_{hitung} < t_{tabel} (n-k-1)$ maka menerima hipotesa nol (H_0) artinya variabel penatausahaan barang miik Negara tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Aceh .
- Jika $t_{hitung} > t_{tabel} (n-k-1)$ maka menolak hipotesa nol (H_0) dan menerima hipotesa alternative (H_a), maka secara parsial dinyatakan bahwa variabel penatausahaan

barang milik Aceh secara individual berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Aceh .

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Penatausahaan BMN	3.8476	0.39487	25
Kualitas Laporan Keuangan	3.5376	0.54512	25

Sumber : Data primer (diolah), Juni 2014

Dari tabel diatas di ketahui bahwa nilai *mean kualitas lapoan keuangan* sebesar 3.5376. Artinya nilaai rata-rata kualitas laporan keuangan Pemerintah Aceh relative baik 3.5376 relatif baik. Dan nilai mean Penatausahaan barang milik negara = 3.8476. Hal ini berarti bahwa penataan ussahaan barang milik Negara cukup baik yaitu 3.8476 skala liket.

4.2 Uji Instrumen Data

Hasil Uji Validitas Data

a. Variabel Penatausahaan Barang Milik Negara t (X)

Kode	Koefisien Korelasi (r_{hitung})	Nilai Kristis (r_{tabel})
A1	.487	0.311
A2	.304	0.311
A3	.527	0.311
A4	.562	0.311
A5	.651	0.311
A6	.228	0.311

b. Variabel Kualitas Laporan keuangan (Y)

Kode	Koefisien Korelasi (r_{hitung})	Nilai Kriostis (r_{tabel})
B1	.412	0.311
B2	.370	0.311
B3	.642	0.311
B4	.377	0.311
B5	.831	0.311
B6	.882	0.311
B7	.831	0.311
B8	.882	0.311

Sumber: Data Primer, juni 2014 (diolah)

Dari penyajian validitas data diatas menunjukkan bahwa koefisien korelasi yang diperoleh masing-masing item dari variabel penatausahaan barang milik negara dan kualitas laporan keuangan berada diatas nilai kritis korelasi product moment (koefisien korelasi > 0.311, sehingga kuesioner yang digunakan dinyatakan valid.

4.3. Hasil Uji Reabilitas

Dalam table dibawah ini disajikan hasil uji reabilitas

Hasil Uji Reliabilitas Data

No	Variabel	Rata-rata	Jmlh Item	Nilai Alpha	Keandalan
1	Penatausahaan barang Milik Negara	23.5600	6	0.705	Handal
2	Kualaitas laporan keuangan	32.0400	8	0.878	Handal

Sumber: Data Primer Juni 2014 (diolah)

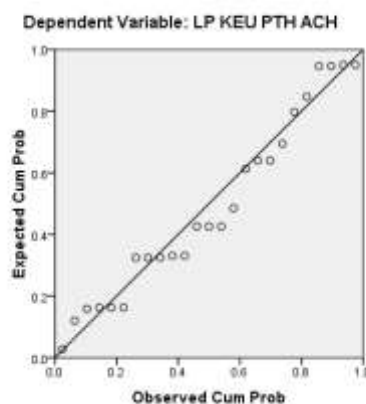
Berdasarkan reliability terlihat bahwa nilai koefisien *alpha cronbach* untuk masing-masing variable berada diatas adalah 0.50. Dengan demikian pengukuran reliabilitas terhadap variabel penelitian menunjukkan bahwa pengukuran keandalan memenuhi kredibilitas *Cronbach Alpha* dimana nilai alphanya sama atau lebih besar dari Alpha 0.50, (Malhotra, 2005 : 305). Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang dijadikan sebagai alat ukur dalam penelitian ini sangat baik dan layak untuk digunakan.

4.4. Hasil Uji Normalitas

Hasil uji normalitas, sebagai berikut :

Hasil Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Tampilan grafik normal *probability plot* pada gambar diatas menunjukkan bahwa titik-titik (data) menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti atau mendekati arah garis diagonal. Hal ini berarti bahwa model-model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

4.5. Pengujian Hipotesis

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS (*Statistical Package for Social Science*) 17.0 for Windows Evolution Version, pengaruh variabel iependenden terhadap variable dependen secara terinci dapat dilihat pada table **di bawah ini**

Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0.491	.456		1.077	.292
BRNG MLK NEGRA	0.858	.117	.837	7.326	.000

a. Dependent Variable: LP KEU PTH ACH

Sumber : Data primer (diolah), juni 2014

Berdasarkan hasil perhitungan table statistik diatas , maka diperoleh persamaan regresi sederhana : $Y = 0.491 + 0.858 X + e$

Berdasarkan persamaan regresi di atas dapat diketahui bahwa nilai konstanta sebesar 0.491 . Artinya bilamana faktor penataan usaha barang milik Negara tetap, maka kualitas laporan keuangan Pemerintah Aceh mengalami kenaikan sebesar 0.491

Koefisien regresi penatanusahaan barang milik Negara (b) sebesar 0,858 , yang berarti koefisien regresi yang diperoleh tidak nol ($b1 \neq 0$). Artinya setiap perubahan dalam penataan usaha barang milik Negara akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Aceh sebesar 0.858, asumsi faktor konstanta tetap

4.6 .Uji Koefisien Korelasi (R) dan Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel berikut ini

Hasil Analisis Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0.837 ^a	0.700	0.687	0.22000	0.734

a. Predictors: (Constant), BRNG MLK NEGRA

b. Dependent Variable: LP KEU PTH ACH

Sumber : Data primer (diolah), JUNI 2014

Berdasarkan Tabel diatas diinterpretasi sbb : a) peroleh nilai koefisien korelasi (R) : 0,837 dan R Square = 0.700. Menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi faktor penatausahaan barang milik Negara sebesar 70,0 %. Sementara sisanya dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. b) *Standar error of the estimate* = 0.22000 lebih kecil dari standar deviasi = 0.54512. Ini berarti relative kuat

4.7. Uji Secara Parsial.

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh variabel penatausahaan barang milik Negara terhadap kualitas laporan keuangan Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh, dilakukan uji secara parsial (uji t). Untuk lebih jelasnya pada tabel berikut ini

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0.491	.456		1.077	.292
BRNG MLK NEGRA	0.858	.117	.837	7.326	.000

a. Dependent Variable: LP KEU PTH ACH

Sumber : Data primer (diolah), juni 2014

Berdasarkan table diatas maka koefisien regresi secara parsial dapat dijelaskan sebagai berikut : Hasil pengujian data diketahui bahwa penatausahaan barang milik Negara t mempunyai $t_{hitung} = 7.326 > \text{tabel } (2,2167)$ dengan tingkat signifikan 0.000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05. Artinya H_0 ditolak dan H_a diterima . Hal ini berarti bahwa variable penatausahaan barang milik negara secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh .

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Secara parsial terdapat pengaruh signifikan penatausahaan barang milik Negara terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Aceh.. Hal ini dapat dilihat Hasil uji $t_{hitung} = 7.326 > \text{tabel } (2,2167)$ dan .Pengaruh relative tinggi, yaitu hasil uji R pada *Model Summary* yaitu sebesar 0.700, yaitu diatas 50 %, jadi pengaruhnya positif dan relatif kuat.

5.2. Saran.

- 1). mempertahankan dan meningkatkan penatausahaan barang milik Negara terutama penyesuaian harga setiap tahun, pencetakan kekayaan yang baik dan benar, dan sebagainya, guna meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Aceh..
- 2) memberikan kesempatan kepada pegawai yang menanganani barang milik negara untuk meningkatkan keterampilan sesuai dengan beban tanggung-jawabnya melalui pendidikan dan pelatihan khusus Barang Milik Negara..

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Dwi, Pratiwi, Sari (2012), Analisis Penatausahaan Barang Milik Negara di Bidang Perlakuan Khusus,(Studi Khusus :Mako Kopr's Brimod Polri Kelapa Dua Depok Tahun 201), Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Republik Indonesia Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 59/PPMK.06/2005 Tentang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah.
- Republik Indonesia Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN,
- Republik Indonesia Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Republik Indonesia Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Peraturan Aceh Qanun Pemerintah Aceh Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh, Penerbit Pemerintah Aceh, Banda Aceh.
- Rahmad, (2013), Analisa Penatausahaan dan Akuntansi Barang Milik Negara (Asset) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan DPKA Kota Semarang. Skripsi Fakultas

Ekonomi UNDIP Negeri Semarang.

Rahmad, S, (2013), Analisa Penatausahaan Barang Milik Negara Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kayu Sumatera Selatan. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Negeri Palembang.

Sugiyono, (2014), **Metode Penelitian Manajemen**, Alfabeta IKAPI, Bandung.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Willy, Yanti, Ningsih, (2012), Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Kewajaran Informasi Keuangan DPKA Kota Semarang. Skripsi Fakultas Ekonomi UNDIP Negeri Semarang.